

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar pada tahun 2010 yaitu 241,8 juta jiwa serta kemudian memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah. Namun data badan pusat statistik (BPS) tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 31,02 juta (13,33 persen) dari total penduduk Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi manusia itu sendiri. Permasalahan aspek kemiskinan diikuti oleh beberapa faktor yang merupakan faktor penting dalam menurun atau meningkatnya angka kemiskinan tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan tersebut yaitu kenaikan bahan bakar minyak. Dengan naiknya harga bahan bakar otomatis tingkat inflasi akan tinggi dan daya beli masyarakat akan berkurang yang kemudian hal ini akan menambah tingkat kemiskinan ditengah - tengah masyarakat.

Angka pendapatan secara riil akan menurun ketika terjadi inflasi yang menyebabkan menurun nya angka konsumsi agregat yang pada akhirnya akan menambah tingkat kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur bagi kualitas pembangunan manusia dimana hal tersebut menjadi hal penting dalam pengentasan kemiskinan. Pembangunan manusia dimulai dari berbagai segi, baik itu aspek mental, intelegensi dan fisik kemudian semuanya hal tersebut menjadi modal suatu bangsa untuk lepas dari kemiskinan.

Terlepas dari aspek aspek tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung sudah mengalami penurunan dalam jumlah maupun persentase namun walaupun demikian pemerintah harus tetap menjadikan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin menjadi prioritas utama. Berikut data jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)
2015	28.51
2016	27.76
2017	26.58
2018	25.67
2019	24.79

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015 – 2019

Sumber : Statistik Indonesia, BPS (Berbagai Edisi)

Dari tabel 1.1, kemiskinan Indonesia cenderung mengalami penurunan. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan jika dilihat dari jumlahnya, penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta dari yang sebelumnya 25,67 juta orang (y)o(y). Kepala BPS Suhariyanto juga mengatakan ada beberapa faktor yang berpengaruh kepada kemiskinan yaitu :

1. Upah buruh. Pada September 2019 rata-rata upah buruh tani naik menjadi Rp.54.424 dari sebelumnya Rp.53.873 atau turun 1,02 persen dari bulan Maret 2019.
2. Tingkat inflasi umum yang rendah yaitu sebesar 1,84 persen juga berpengaruh kepada tingkat kemiskinan. Tercatat ada beberapa komoditas yang memberi sumbangan besar kepada garis kemiskinan di bulan September 2019 di perkotaan, antara lain , beras, berkontribusi 20,35%, rokok kretek filter berkontribusi 11,17%, telur ayam ras berkontribusi 4,44%, daging ayam ras berkontribusi 4,07%, mie instan berkontribusi 2,32%. (Suhariyanto, 2019: 2)

Dengan dikendalikannya inflasi oleh pemerintah baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter, maka terciptalah kondisi dimana harga mengalami kondisi stabil

dimana hal tersebut dapat ditingkatkan kearah peningkatan daya beli masyarakat yang akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi dasar (*basic need approach*). Akhir akhir ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang jumlah rata rata pengeluaran perkapitanya tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dan sandang kehidupannya atau dapat dikatakan masyarakat yang memiliki pengeluaran dibawah garis kemiskinan. Dengan adanya hal tersebut,

Tahun	PDB (Milyar Rupiah)
2015	11.526.332,8
2016	12.401.728,5
2017	13.589.825,7
2018	14.838.311,5
2019	15.833.943,4

tentunya berpengaruh terhadap pendapatan nasional suatu negara, dimana konsumsi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya atau menurunnya jumlah pendapatan nasional suatu negara.

Tabel 1.2 Jumlah PDB (Atas Harga Berlaku) Tahun 2015 – 2019

Sumber : *Series data PDB atas Dasar Harga Berlaku, BPS*

Perekonomian Indonesia tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.11.526.332,8 milyar. Kemudian disusul dengan tahun 2016 yang mencapai Rp.12.401.728,5 milyar dan pada tahun 2017 meningkat hingga angka Rp.13.589.825,7 milyar. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 masing masing sebanyak Rp.14.838.311,5

milyar dan Rp.15.833.943,4 milyar. Masing masing dilihat dari peningkatan PDB atas harga berlaku mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun , hal ini dipengaruhi oleh tumbuh baiknya sektor sektor perindustrian maupun ekspor impor yang mempengaruhi peningkatan PDB Indonesia.

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. Indonesia masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Disamping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah penanaman modal asing langsung (*foreign direct invesment*). (Sarwedi, 2002: 18)

Tabel 1.3 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri

Tahun	Investasi Asing Langsung (Juta US\$)
2015	29 275,94
2016	28 964,10
2017	32 239,80
2018	29 307,91
2019	28 208,76

Sumber : *Data series subyek Keuangan, BPS*

Tabel 1.3 diatas menunjukkan angka perkembangan realisasi investasi asing langsung di Indonesia mulai dari tahun 2015 sejumlah 29,975,94 US\$ kemudian mengalami penurunan sebanyak 31,184 US\$ yaitu menjadi 28,964,10 US\$ pada tahun 2016. “Dengan menurunnya investasi asing langsung di Indonesia pada tahun 2016 yang dimana hal tersebut disebabkan masih adanya gap antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerbitkan izin investasi”(Lembong, 2016: 1).

Zaenudin (2009: 156) berpendapat bahwa “investasi asing dianggap lebih menguntungkan karena tidak memerlukan kewajiban pengembalian kepada pihak asing seperti halnya hutang luar negeri”. Penanaman modal asing langsung mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan serta pembangunan perekonomian yang lebih baik. Dengan adanya kondisi pembangunan dan perekonomian yang lebih baik, maka angka pembangunan manusia akan lebih meningkat dari tahun ke tahun. Berikut data tingkat IPM:

Tahun	Tingkat IPM (%)
2015	69,55
2016	70,81
2017	71,39
2018	71,82
2019	71,92

Tabel 1.4 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: Statistik Indonesia tahun 2021

Dari Tabel 1.4, secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama 2105 hingga 2019. IPM Indonesia meningkat dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 71,92 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,87 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2016. Pada periode 2018–2019, IPM Indonesia tumbuh 0,74 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2019 sebesar 71,92, lebih tinggi dari IPM tahun 2018 yang sebesar 71,39.

Kenaikan IPM ini sejalan dengan perbaikan angka harapan hidup, kualitas pendidikan, dan serta daya beli masyarakat. Ini karena persentase rumah tangga yang bisa mengakses air minum sehat dan rumah tangga yang menggunakan air minum layak mengalami peningkatan, dan perkawinan dini mengalami yang mengalami penurunan. (Suhariyanto, 2020: 1)

Peningkatan angka indeks pembangunan manusia per tahunnya dipengaruhi oleh angka inflasi. Jika inflasi meningkat, maka tingkat kesejahteraan akan terganggu kemudian hal itu akan berakibat turunnya daya beli masyarakat.

Tahun	Inflasi (%)
2015	3.35
2016	3.02
2017	3.61
2018	3.13
2019	2.72

Tabel 1.5 Laju Inflasi Indonesia per Tahun

Sumber: Statistik Indonesia, BPS (Berbagai Edisi)

Berdasarkan Tabel 1.5 yang memuat data tentang pergerakan tingkat inflasi di Indonesia, pada tahun 2015 tingkat inflasi sebesar 3,35 persen , berbeda dengan tahun setelahnya yang mengalami penurunan sebesar 0,33 persen menjadi 3,02% pada tahun 2016. Pada Desember 2017 , tingkat inflasi berada pada angka 3,61 persen dan kemudian disusul dengan peningkatan angka inflasi pada 2018 sebesar 3,13 persen dan kemudian menurun pada tahun 2019 pada angka 2,72 persen.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan nasional , investasi asing langsung , indeks pembangunan manusia dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengaruh Pendapatan Nasional, Investasi Asing Langsung, Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2000 – 2019.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pendapatan nasional terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2000 – 2019 ?
2. Bagaimanakah pengaruh investasi asing langsung terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2000 – 2019 ?
3. Bagaimanakah pengaruh ipm terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000 – 2019 ?
4. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2000 – 2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan nasional, terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2000 – 2019 .
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi asing langsung terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2000 – 2019
3. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000 – 2019
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2000 – 2019

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan

- a. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan pembandingan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai salah satu sumber informasi tentang permasalahan perkembangan kemiskinan di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Bagi peneliti, sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan untuk memperoleh gambaran mengenai indeks pembangunan manusia, investasi asing langsung, inflasi, pendapatan

nasional, dan jumlah penduduk miskin serta melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN

TEORI

2.1. Teori Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional adalah jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa oleh suatu negara dalam tahun tertentu. Pendapatan nasional dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pendapatan Domestik Bruto (Pendapatan Nasional) dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB).

Pendapatan Domestik Bruto adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam suatu tahun tertentu, sedangkan Pendapatan Nasional Bruto adalah nilai dari semua barang jadi dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi domestik dalam negeri dalam suatu periode tertentu. (Ukhrowiyah, 2014: 5)

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam satu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah harga barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun. (Daya, 2020: 18)

Sedangkan PDB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

2.1.1. Pendekatan Perhitungan Pendapatan Nasional

2.1.1.1. Pendekatan Pengeluaran

Menurut Fauziana (2014: 375) "pendekatan pengeluaran dihitung dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu". Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: rumah tangga, pemerintah, investasi, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X-M). Berikut rumusnya:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir meliputi (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan; (2) pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok; (3) pengeluaran konsumsi pemerintah; serta (4) ekspor barang dan jasa-jasa dikurangi dengan impor barang dan jasa-jasa. (Purba, Tobing, dan Hutabarat, 2012: 16)

2.1.1.2. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. “Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan produksi adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi)”(Fauziana, 2014: 375). Berikut rumusnya:

$$Y = (P1 \times Q1) + (P2 \times Q2) + \dots (Pn \times Qn)$$

2.1.1.3. Pendekatan Pendapatan

“Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah,sewa, bunga dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan”(Fauziana, 2014: 375). Dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = r + w + i + p$$

“Bagi yang memiliki SDA berupa tanah, maka ia akan memperoleh uang sewa (rent). Bagi yang memiliki SDM, maka ia akan memperoleh upah (wage), bagi yang mempunyai modal, maka ia akan menerima bunga (interest) dan bagi yang mempunyai tenaga ahli, maka ia akan memperoleh laba (profit)”(Yoshanda, 2020: 22).

2.1.1.4 Hubungan Pendapatan Nasional dengan Jumlah Penduduk Miskin

Pendapatan nasional yang baik adalah tingkat pendapatan yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah kemiskinan serta mengurangi kesenjangan pendapatan.

Candra Mustika (2011: 19) berpendapat bahwa :

Produk Domestik Bruto merupakan suatu indikator keberhasilan suatu negara dalam pencapaian pembangunan yang lebih baik, dimana apabila produk Domestik Bruto negara tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan maka dapatlah dikatakan bahwa roda pembangunan negara tersebut sangat baik karena Produk Domestik Bruto yang tercermin merupakan gambaran angka yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas serta penurunan kemiskinan.

2.2 Teori Investasi

2.2.1 Pengertian Investasi

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal berjangka.

2.2.2 Teori Teori Investasi

a. Teori Neo Klasik

Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 Penanaman Modal Asing

Investasi asing langsung juga dikenal dengan penanaman modal asing (PMA). Investasi asing langsung merupakan aktivitas bisnis atau pengadaan alat-alat serta fasilitas produksi seperti halnya membuka pabrik-pabrik, membeli lahan, membeli bahan baku, mendatangkan mesinmesin, dan lain-lain yang dijalankan dengan menggunakan dana atau uang investasinya secara langsung. Pengertian *Foreign Direct Investment* di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menurut penjelasan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Dari pengertian tersebut, terdapat poin pokok yaitu modal dan penanam modal asing. Modal dalam Undang-undang ini memiliki pengertian sebagai aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang atau yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Sementara penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing dapat berbentuk penanaman modal langsung (*foreign direct investment*) maupun tidak langsung (*foreign indirect investment*).

Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih

teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. “Penanaman Modal asing adalah suatu bentuk lain dari arus modal internasional yang masuk ke suatu negara yang bersumber dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang”(Purba, Tobing, dan Hutabarat 2014: 223).

Jenis FDI menurut Kurniati, Prasmuko dan Yanfitri adalah sebagai berikut :

1. FDI vertikal FDI yang dilakukan secara vertikal menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara-negara yang memiliki biaya tenaga kerja yang rendah, kemudian hasil produksi di negara tersebut akan disalurkan kembali ke negara induk. Misalnya suatu produk yang proses produksinya *capital-intensive* akan memindahkan proses produksinya ke negara-negara yang kaya akan modal.
2. FDI horizontal FDI yang dilakukan secara horizontal akan memproduksi barang yang sama di beberapa negara. FDI jenis ini memiliki motivasi untuk mencari pasar yang baru. Keuntungan dari FDI dengan jenis ini adalah efisiensi di dalam biaya transportasi, karena tempat produksi yang ada menjadi lebih dekat dengan konsumen. (2007: 16-17).

2.2.4 Investasi Asing Langsung di Indonesia

Kenaikan aliran modal masuk FDI ke Indonesia masih relatif terbatas. “Sebagai bentuk aliran modal yang bersifat jangka panjang dan relatif tidak rentan terhadap gejolak perekonomian, aliran masuk FDI sangat diharapkan untuk membantu mendorong pertumbuhan investasi yang *sustainable* di Indonesia” (Kurniati, Prasmuko dan Yanfitri 2007: 3). Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui determinan FDI di Indonesia sehingga kebijakan untuk mendorong

peningkatan aliran FDI dapat lebih efektif diarahkan pada faktor-faktor yang berperan penting dalam mendorong minat investor asing untuk menanamkan modal dalam bentuk FDI di Indonesia.

2.2.5 Hubungan Investasi dengan Kemiskinan

Kegiatan investasi asing memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kegiatan investasi asing yang dilakukan tidak saja investasi yang bersifat fisik, juga investasi non fisik seperti investasi sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pendidikan. Di mana dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang. Rendahnya produktivitas tenaga kerja kaum miskin dapat disebabkan oleh karena rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, sehingga mereka dapat keluar dari jeratan kemiskinan. (Jonaidi, 2012: 144)

2.3 Indeks Pembangunan Manusia

2.3.1 Pengertian Indeks Pembangunan manusia

UNDP (*United Nations Development Programme*), dalam Irmayanti memberikan pengertian bahwa:

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya di analisis serta dapat dipahami dari sudut manusianya bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. (Irmayanti, 2017: 19)

Kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) edisi pertama yang dipublikasikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia. Dalam hal ini menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukannya sebagai alat pembangunan. Hal ini harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya

Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dari konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat.

2.3.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Badan pusat statistik (BPS) menyatakan manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut :

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS, 2020:1).

Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut ini :

1. Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup
2. Pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah dan tinggi
3. Standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk *Purchasing Power Parity* (PPP).

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0–100 artinya semakin rendah nilai IPM suatu wilayah/negara berarti semakin lemah dan tertinggal pembangunan wilayah atau negara tersebut dan sebaliknya apabila nilai IPM suatu wilayah tinggi berarti semakin kuat dan maju pembangunan wilayah atau negara tersebut. Berdasarkan kategorinya menurut Prima Sugmaraga (2011: 1) IPM dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu sebagai berikut :

1. Tinggi : IPM lebih dari 80,0
2. Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
3. Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
4. Rendah : IPM kurang dari 50,0

2.3.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan

Salah satu penyebab terjadinya kenaikan angka kemiskinan dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Salah satu acuan yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya.

Menurut Ginting (2008: 18)

Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar. Tersedianya fasilitas dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

2.4 Inflasi

2.4.1 Pengertian Inflasi

Menurut Suparmono dalam Imelia menjelaskan inflasi sebagai berikut, yaitu:

Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat terlebih lagi kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain dipasar. Terus menerus berarti bahwa kenaikan harga terjadi tidak sesaat saja. (Imelia, 2012: 43)

Bank Indonesia mengartikan inflasi sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Secara umum inflasi merupakan penyebab

turunnya daya beli dari nilai uang terhadap barang-barang dan jasa, besar kecilnya ditentukan oleh elastisitas permintaan dan penawaran akan barang dan jasa.

2.4.2 Jenis – Jenis Inflasi

Berdasarkan sumber atau kenaikan harga-harga yang berlaku Sadono Sukirno menjelaskan bahwa inflasi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu;

1. Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa.

2. Inflasi Desakan Biaya

Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah rendah.

3. Inflasi Diimpor

Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga yang diimpor. Inflasi ini akan terwujud apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan perusahaan. (Sukirno, 2016: 333-336)

2.4.3 Hubungan Inflasi dengan Kemiskinan

Dalam perspektif makroekonomi pendapatan riil masyarakat turun sehingga kemakmuran masyarakat berkurang dan kondisi ini dapat dimaknai meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Ningsih dan Shaleh menjelaskan bahwa :

Hubungan antara inflasi dengan kemiskinan suatu negara adalah searah. Kenaikan inflasi akan tercermin dari kenaikan harga barang dan jasa yang tersedia dan dibutuhkan masyarakat sehingga berefek menurunkan daya beli. Secara global kejadian ini akan menurunkan kesejahteraan secara riil atau dapat pula dikatakan menaikkan kemiskinan. Potret lain dari kenaikan inflasi akan tampak dari peningkatan jumlah uang beredar baik kartal maupun giral melebihi volume barang dan jasa yang dihasilkan. Ketimpangan ini akan menyulut kenaikan harga komoditas yang merambah pada seluruh

barang dan jasa sehingga menurunkan kemakmuran masyarakat yang berarti peningkatan kemiskinan. (2017: 522)

2.5. Kemiskinan

2.5.1. Pengertian Kemiskinan

Definisi dan konsep mengenai kemiskinan. Kemiskinan sekarang ini merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan memiliki aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan, serta keterampilan. Aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Menurut Michael Parkin dalam Ginting dan Dewi (2013: 119) kemiskinan adalah situasi dimana pendapatan rumah tangga terlalu rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

2.5.2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Nasikun dalam Irhamni, salah satu sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan adalah :

Population growth, prespektif yang didasari oleh teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung. Akibatnya sumber daya bumi tidak mampu mengimbangi kebutuhan manusia yang terus bertambah dengan cepat, hal itulah yang menimbulkan kemiskinan. (Irhamni, 2018: 88-97)

Akibat buruk yang mungkin ditimbulkan oleh perkembangan penduduk terhadap pembangunan akan tercipta apabila produktivitas sektor produksi sangat rendah dan dalam masyarakat terdapat banyak pengangguran.

Dengan berlaku keadaan ini maka penambahan penduduk tidak akan menaikkan produksi dan yang lebih buruk lagi masalah pengangguran akan menjadi lebih serius.

2.5.3. Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk mengukurnya. Menurut Purba, Tobing dan Hutabarat (2014: 223) menjelaskan kemiskinan dijelaskan sebagai berikut :

Kemiskinan absolut adalah suatu konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan tetapi pada ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum agar bisa bertahan hidup. Kebutuhan-kebutuhan minimum dimaksud antara lain sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan relatif adalah suatu konsep yang mengacu pada garis kemiskinan (*poverty line*) yang sebenarnya merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah di lakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Candra Mustika	Pengaruh PDB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990-2008	1. Variabel PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 2. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Chairul Nizar, Abubakar Hamzah dan Sofyan Syahnur	Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Investasi Asing Langsung berpengaruh tidak begitu besar namun tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. 2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak begitu besar namun tetap berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
Prima Sukmaraga	Analisis IPM, PDRB Perkapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. 2. Variabel PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. 3. Variabel jumlah pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.
A. Mahendra	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara

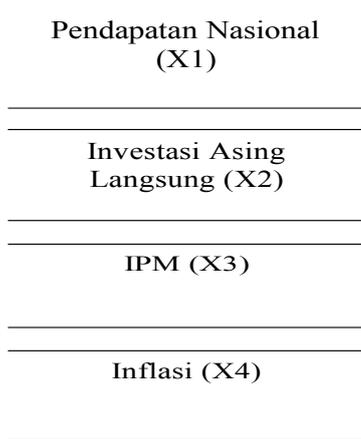
2.7 Kerangka Pemikiran

Pengentasan penduduk miskin saat ini masih merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang senantiasa menyita perhatian semua kalangan, karena masalah kemiskinan menyangkut berbagai aspek. Sulitnya penyelesaian masalah ini disebabkan oleh permasalahan yang melibatkan penduduk miskin. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini ada empat variabel

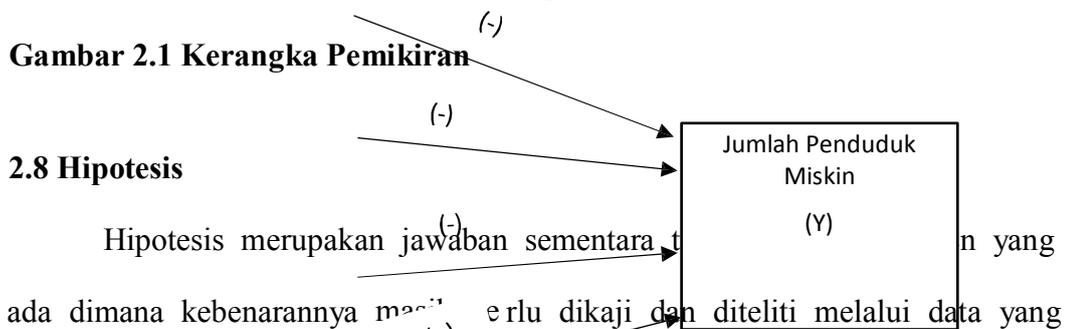
independen, antara lain pendapatan nasional, investasi asing langsung, indeks pembangunan manusia dan inflasi. Indeks pembangunan manusia adalah memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus, investasi asing langsung adalah bagaimana masyarakat dapat memperoleh modal melek teknologi dan pendapatan nasional adalah perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan barang modal, lalu penggunaan data tersebut akan sangat berpengaruh pada distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Keempat variabel tersebut merupakan variabel independen, bersama-sama dengan jumlah penduduk miskin sebagai variabel dependen akan diregresikan untuk mendapatkan tingkat signifikasinya. Dengan hasil regresi tersebut diharapkan mendapatkan tingkat signifikansi setiap variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan. Selanjutnya, tingkat signifikansi setiap variabel independen tersebut diharapkan akan mampu memberikan definisi gambaran kepada pemerintah serta dengan pihak yang terkait mengenai penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan dan efektif dalam upaya pengentasan dan menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat digambarkan kerangka pemikiran mengenai pengaruh pendapatan nasional, investasi asing langsung, indeks



pembangunan manusia dan inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000 – 2019 adalah sebagai berikut



2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang ada dimana kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data yang terkumpul. Pada dasarnya hipotesis merupakan suatu pernyataan tentang hakikat dan hubungan antara variabel – variabel yang dapat diuji secara empiris

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang sudah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Nasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019.
2. Investasi asing langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000 – 2019
3. Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000-2019

4. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000 – 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Data yang digunakan meliputi data jumlah penduduk miskin di Indonesia, data pendapatan nasional dihitung melalui PDB atas dasar harga berlaku, data realisasi investasi asing langsung, data indeks pembangunan manusia dan data tingkat inflasi atas indeks harga konsumen. Objek penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin, dimana peneliti bermaksud untuk menganalisis pengaruh-pengaruh pendapatan nasional, investasi asing langsung, indeks pembangunan manusia dan tingkat inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam periode tahunan yaitu sejak kurun tahun 2000-2019.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan yang dikumpulkan adalah meliputi data jumlah penduduk miskin, pendapatan nasional yang dihitung dengan konsep PDB atas dasar harga berlaku, data realisasi investasi asing langsung, data indeks pembangunan manusia dan data tingkat

inflasi dengan konsep indeks harga konsumen. Jangka waktu data yang digunakan adalah tahun 2000 sampai dengan tahun 2019. Jenis data adalah data *time series* (runtun waktu). Data *time series* adalah data yang menggambarkan suatu perkembangan dari waktu ke waktu atau periode secara historis.

3.3 Model Analisis

3.3.1 Model Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah teknik analisis yang akan menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam penelitian dengan menggunakan model regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi linier berganda tersebut, adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \hat{\beta}_3 X_{3i} + \hat{\beta}_4 X_{4i} + \epsilon_i; i = 1, 2, 3 \dots n.$$

dimana

Y = Jumlah penduduk miskin (juta jiwa).

$\hat{\beta}_0$ = Intersep

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3, \hat{\beta}_4$ = Koefisien regresi

X_1 = Pendapatan nasional (milyar rupiah)

X_2 = Investasi asing langsung (US\$ juta)

X_3 = Indeks pembangunan manusia (%)

X_4 = Inflasi (%)

ϵ_i = Galat (error term)

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik maka persamaan regresi dianalisis dengan model *double log*. Dengan menggunakan model *double-*

log maka data yang ditransformasikan adalah X dan Y. “Karena data dalam penelitian memiliki satuan ukur yang berbeda sehingga data asli harus ditransformasi sebelum bisa dianalisis”(Sholihah, 2016: 68).

3.3.2 Pengujian Hipotesis

3.3.2.1 Uji Secara Individu (Uji-t)

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (pendapatan nasional, investasi asing langsung, indeks pembangunan manusia dan inflasi) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (jumlah penduduk miskin), maka dilakukan pengujian dengan uji-t dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$.

a) Pendapatan Nasional (X_1)

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya pendapatan nasional tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000 – 2019.

$H_1 : \beta_1 > 0$, artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan nasional terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000 – 2019.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_{hitung} = \frac{\beta_1}{S(\beta_1)}$$

β_1 : koefisien regresi
 $S(\beta_1)$: parameter

$S(\beta_1)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pendapatan nasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah

penduduk miskin di Indonesia. Kemudian jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya pendapatan nasional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

b) Investasi Asing Langsung (X_2)

$H_0: \beta_2 = 0$, artinya, investasi asing langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000 – 2019.

$H_1: \beta_2 < 0$, artinya, investasi asing langsung berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000 – 2019.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t = \frac{\hat{\beta}_2}{S(\hat{\beta}_2)}$$

$\hat{\beta}_2$: koefisien regresi

$S(\hat{\beta}_2)$: parameter

$S(\hat{\beta}_2)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya investasi asing langsung secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kemudian apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya investasi asing langsung secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia.

c. IPM (X₃)

H₀ : $\beta_3 = 0$, artinya, IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000 – 2019.

H₁ : $\beta_3 < 0$, artinya, IPM berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk di Indonesia tahun 2000 – 2019

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah

$$t = \frac{\beta_3}{S(\beta_3)}$$

β_3 : koefisien regresi

β_3 : parameter

$S(\beta_3)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, artinya IPM secara parsial signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kemudian apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak, artinya IPM secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

d. Inflasi (X₄)

H₀ : $\beta_3 = 0$ artinya, tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2000 – 2019.

H₁ : $\beta_3 > 0$ artinya, tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah

penduduk miskin di Indonesia tahun 2000 – 2019.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{S(\hat{\beta}_3)}$$

$\hat{\beta}_3$: koefisien regresi

β_3 : parameter

$S(\hat{\beta}_3)$: simpangan baku

Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya tingkat inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kemudian apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tingkat inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

3.3.2.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji “F” digunakan untuk mengetahui proporsi variabel terikat yang dijelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji F statistik ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama atau tidak. Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut:

a. Membuat hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) sebagai berikut :

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0, i=1,2,3$, berarti variabel bebas secara serempak/bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

$H_1: \beta_i$ tidak semua nol, $i = 1, 2, 3$, berarti variabel bebas secara serempak/bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan α dan df untuk *numerator* (k-1) dan df untuk *denominator* (n-k).

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah : $\frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Apabila nilai $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 di tolak, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.3.2.3 Uji Kebaikan Suai : Koefisien Determinasi (R^2)

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel terikat dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai model yang

digunakan koefisien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$, artinya nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen”(Ghozali, 2017 :21)

3.3 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.3.1 Multikolinieritas

”Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen” (Ghozali, 2017 :33).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.

d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai $VIF \leq 10$ dan $FOL \leq 0.1$ maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinearitas, namun bila sebaliknya $VIF \geq 10$ dan $FOL \geq 0.1$ maka dianggap ada pelanggaran multikolinearitas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinearitas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks $> 0,95$ maka kolinearitasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks $< 0,95$ maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan cara regresi sekuensial antara sesama variabel bebas. Nilai R^2 sekuensial dibandingkan dengan nilai R^2 pada regresi model utama. Jika R^2 sekuensial lebih besar dari pada nilai R^2 pada model utama maka terdapat multikolinearitas.

3.3.2 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara galat (kesalahan pengganggu, *disturbance error*) pada periode waktu t dengan galat pada periode waktu $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji:

1. Durbin Watson (uji D – W)

”Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel bebas”(Ghozali, 2017 :94). Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis dL dan dU dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai α . Secara umum bisa diambil patokan :

1. $0 < d < dL$ Menolak hipotesis 0 (ada autokorelasi positif)
2. $dL \leq d \leq dU$ Daerah Keragu-raguan (tidak ada keputusan)
3. $dU < d < 4 - dU$ Gagal Menolak Hipotesis 0 (tidak ada autokorelasi positif / negative).
4. $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$ Daerah Keragu-raguan (tidak ada keputusan)
5. $4 - dL < d < 4$ Menolak Hipotesis 0 (ada autokorelasi negative)

2. Uji Run

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan uji Run. Uji Run merupakan bagian dari statistika nonparametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau radom. “Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara

random atau tidak (sistematis)” (Ghozali, 2017: 102). Cara yang digunakan dalam uji Run adalah sebagai berikut :

H_0 : Galat (res_1) acak (random)

H_1 : Galat (res_1) tidak acak

3.3.3 Uji Normalitas

Sesuai teorema Gauss Markov :

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \epsilon_i$$

1. $\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ Apakah galat (distribusi error) menyebar normal atau tidak
2. tidak terjadi autokorelasi.

Asumsi klasik yang lain dalam pendugaan dengan menggunakan penduga OLS adalah kenormalan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. “Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil” (Ghozali, 2017: 127). Untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis grafik dan uji statistik.

1. Analisis Grafik

Untuk menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya adalah dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan

dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

2. Analisis Statistik

Untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal dengan menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu dilengkapi dengan uji statistik, yaitu dengan melihat nilai kemencengan atau penjururan (*skewness*) dan keruncingan (*kurtosis*) dari sebaran galat. Menurut Ghozali nilai Z statistik untuk kemencengan dan nilai z keruncingan dapat dihitung dengan rumus, yaitu sebagai berikut :

$$Z_{skewness} = \frac{skewness}{\sqrt{\frac{6}{n}}} \text{ dan } Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis - 3}{\sqrt{\frac{24}{n}}}, \text{ dimana } n \text{ adalah ukuran}$$

sampel.

Menurut Ghozali (Ghozali, Ekonometrik Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24, 2017), untuk menguji apakah sebaran galat pendugaan regresi menyebar normal atau tidak, dapat digunakan uji statistik lain yaitu uji statistik nonparametrik Kolmogrof-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Data galat (residu) menyebar normal

H_1 : Data galat tidak menyebar normal.

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk Miskin (Y)

Jumlah Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Data yang digunakan adalah jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2000-2019 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, yang dinyatakan dalam satuan juta orang/tahun.

2. Pendapatan Nasional (X1)

Pendapatan Nasional yang digunakan adalah konsep PDB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku. Data tersebut diperoleh dari BPS dengan satuan milyar rupiah/tahun.

3. Investasi Asing Langsung (X2)

Investasi asing langsung adalah salah satu cara untuk meningkatkan jumlah uang yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan untuk memperoleh timbal balik dimasa depan, dengan pengadaan alat alat serta fasilitas produksi seperti membuka pabrik, membeli lahan dan mendatangkan mesin – mesin. Data yang digunakan adalah pengaliran dana investasi asing langsung di Indonesia periode tahun 2000-2019. Investasi asing langsung di hitung dalam satuan juta dollar/tahun.

4. Indeks Pembangunan Manusia (X3)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data Indeks Pembangunan Manusia

Indonesia tahun 2000-2019. Sumber data diperoleh dari BPS dan satuannya dalam persen/tahun.

5. Inflasi (X4)

Inflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat kenaikan harga-harga umum secara terus menerus yang diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen. Data tersebut diperoleh dari statistik ekonomi keuangan Indonesia atau laporan tahunan Bank Indonesia (BI) yang dinyatakan dalam persen/tahun.